

**IMPLEMENTASI PROGRAM ASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
(ASKESOS) NEW INITIATIVE**
BAGI PEKERJA MANDIRI SEKTOR INFORMAL DI TIGA KABUPATEN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013-2014



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Dosen Pembimbing:

Muhammad Izzul Haq M.Sc.

NIP. 19810823 200901 1 007

Disusun Oleh:

Hani Amaria

NIM. 10250042

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hani Amaria

NIM : 10250042

Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Implementasi Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) *New Initiative* bagi Pekerja Mandiri *Sektor Informal* di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Desember 2014





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hani Amaria

NIM : 10250025

Judul Skripsi : **Implementasi Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) New Initiative bagi Pekerja Mandiri Sektor Informal di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam bidang Kesejahteraan sosial

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 8 Desember 2014

Ketua Jurusan KS

Dr. H. Zainudin, M.Ag
NIP. 19660827 199903 1 001

Pembimbing

Muhammad Izzul Haq, M.Sc.
NIP.19560704 198603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9 / 66 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

IMPLEMENTASI PROGRAM ASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (ASKESOS)
NEW INITIATIVE BAGI PEKERJA MANDIRI SEKTOR INFORMAL DI TIGA
KABUPATEN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013-2014

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	:	Hani Amaria
NIM/Jurusan	:	10250042/IKS
Telah dimunaqsyahkan pada	:	Kamis, 11 Desember 2014
Nilai Munaqsyah	:	92.03 (A -)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQSYAH

Ketua Sidang/Pengaji I,

Dr. H. Waryono, M.Ag.

NIP 19701010 199903 1 002

Pengaji II,

Muhammad Izzul Haq, S.Sos, M.Sc.

NIP 19810823 200901 1 007

Pengaji III,

Abidah Muhibati, S.Th.I, M.Si.

NIP 19770317 200604 2 001

Yogyakarta, 11 Desember 2014

Dekan,



Dr. H. Waryono, M.Ag.

NIP 19701010 199903 1 002

MOTTO

“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir; pada setiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Al-Baqarah: 261)

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Adz-Dzariyat: 19)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Almamater tercinta Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa dengan penuh
keikhlasan, ketulusan, kesabaran dan kasih sayang telah
merawat, membesarkan, mendidik dan membimbing ananda.

Beserta Adik-adik ku tersayang Anita Ria dan Nur Asia yang
telah memberikan motivasi dan semangat menyelesaikan studi.

ABSTRAK

Hani Amaria, Implementasi Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) *New Initiative* bagi Pekerja Mandiri Sektor *Informal* di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014. Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) *new initiative* bagi pekerja mandiri Sektor *Informal* di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2014. Penelitian ini dilatar belakangi oleh, 1) kecelakaan dan kematian akibat kerja bisa terjadi pada siapapun kapanpun dan dimanapun baik itu pekerja sektor *formal* maupun *informal*, 2) data pekerja sektor *informal* lebih besar dibandingkan pekerja sektor *formal*, 3) adanya kebijakan pemerintah UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, 4) adanya perubahan skema Askesos lama menjadi Askesos *new initiative*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil obyek penelitian implementasi program Askesos *new initiative* bagi pekerja mandiri sektor *informal* di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2014. Subjek penelitian ini adalah Pegawai atau Staf seksi KTKPM di Dinas Sosial DIY sebagai pengendali program Askesos, dilengkapi dengan tim pelaksana Askesos di beberapa LPA sebagai pelaksana pada tingkat komunitas, para pendamping, BPJS Ketenagakerjaan serta peserta Askesos yang mengajukan klaim dan non klaim. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua informasi, mereduksi data, menyajikan hasil temuan dengan teknik berfikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Askesos *new initiative* dilakukan oleh beberapa implemenber melalui tahap interpretasi, pengorganisasian dan pengaplikasian. Pengaplikasian program Askesos *new initiative* melalui proses sosialisasi, observasi, seleksi dan penetapan yayasan/organisasi sosial pelaksana LPA, seleksi peserta Askesos, seleksi dan penetapan pendamping Askesos, bimbingan motivasi peserta Askesos, bimbingan teknis dan supervisi bagi LPA, pendampingan, pelaksanaan tabungan dan CDS, tahap pengajuan manfaat serta tahap pengendalian.

Pelaksanaan program Askesos *new initiative* dipengaruhi dengan beberapa faktor antara lain faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Program Askesos sangat bermanfaat bagi para peserta Askesos sektor *informal* yang berpenghasilan rendah beserta keluarga yang ditinggalkan dengan mendapat bantuan berupa JKK dan JKM, namun ada beberapa faktor yang dikeluhkan oleh para implemenber dan peserta Askesos yaitu kecukupan sumber daya keuangan, informasi serta disposisi BPJS Ketenagakerjaan.

Kata kunci: Implementasi Program Askesos *new initiative*, Sektor *informal*, Tiga Kabupaten DIY.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض بالحق،أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. اما بعد

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Asuransi Kesejahteraan (Askesos) *New Initiative* bagi Pekerja Mandiri *Sektor Informal* di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014” ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang akan memberikan syafaatnya pada hari kiamat, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa segala sesuatu yang dikerjakan manusia tidak akan berhasil tanpa adanya ridho dan karunia dari Allah SWT serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis merasa perlu menghaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr.H. Zaenudin, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya yang telah memberikan izin judul penelitian ini, segenap para dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu kepada penulis selaku mahasiswa, kepada Bapak Muhammad Izzul Haq M.Sc. selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dengan tulus dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, teruntuk Ibunda dan Ayahanda tercinta dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kasih sayang memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Bapak Budi Wibowo Selaku Ketua Seksi KTKPM, Ibu Lilis Pengelola Program Askesos beserta para stafdi Dinas Sosial DIY, kepada bapak Novaria Sulistyo bagian Administrasi informal khusus BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang DIY,kepada peserta Askesos, kepada tim Lembaga Pelaksana Askesos dan para Pendamping

di LPA Sekaringtyas, Paguyuban Petugas Parkir Malioboro serta Wiyata Dharma yang telah memberikan informasi mengenai implementasi program Askesos, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Tak lupa pula penulis ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat Fadliyaturrohmah, Trihono, Andini Tiara, Belqis Noor dan lain-lain yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan waktu untuk menemani dalam proses penelitian.

Penulis juga telah mengupayakan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Atas kritik dan saran yang diberikan, penulis mengucapkan terimakasih.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT dan semoga menjadi amal sholeh serta bermanfaat bagi penulis.
(Amin)

Yogyakarta, 8 Desember 2014

Hani Amaria

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	4
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	37
H. Sistematika Pembahasan	44

BAB II GAMBARAN UMUM IMPLEMENTER ASKESOS NEW INITIATIVE DI TIGA KABUPATEN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Dinas Sosial DIY	45
B. Gambaran Umum LPA	55
C. Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan	78

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (ASKESOS) NEW INITIATIVE DI TIGA KABUPATEN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Implementasi Program Askesos <i>New Initiative</i>	86
1. Tahap Interpretasi.....	90
2. Tahap Pengorganisasian.....	90
3. Tahap Aplikasi	97
a. Sosialisasi Program Askesos.....	98
b. Observasi, Seleksi dan Penetapan Yayasan/Organisasi Sosial Pelaksana LPA	102
c. Seleksi dan penetapan pendamping Askesos	105
d. Seleksi Peserta.....	107
e. Bimbingan motivasi peserta Askesos	110
f. Bimbingan teknis dan supervisi bagi Lembaga Pelaksana Askesos (LPA)	113
g. Pendampingan dan pelaksanaan tabungan dan CDS	115
h. Tahap pengajuan manfaat	118
i. Tahap pengendalian	126
B. Faktor Keberhasilan Implementasi Program Askesos <i>New Initiative</i>	132

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	155
B. REKOMENDASI.....	156

DAFTAR PUSTAKA 158

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto-foto

Lampiran2 Kegiatan Pemantapan Petugas

Lampiran3 Materi Sosialisasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Lampiran4 Pedoman Pengumpulan Data

Lampiran5 Tabel Klaim Peserta Askesos Tahun 2013-2014

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1:Karakteristik Sektor Formal dan Sektor Informal	29
Tabel 2.1: Susunan Organisasi dan Ketugasan Dinas Sosial DIY	49
Tabel 2.2: Data LPA tahun 2013-2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta	56
Tabel 2.3: Jumlah Rujukan PSI oleh LPA Paguyuban Petugas Parkir	62
Tabel2.4: Jumlah Data Peserta LPA Paguyuban Petugas Parkir Malioboro Terdaftar Program Askesos.....	65
Tabel 2.5: Jumlah Data Peserta LPA Sekaringtyas Terdaftar Program Askesos.....	70
Tabel 2.6: Jumlah Rujukan PSI oleh LPA Wiyata Dharma.....	77
Tabel 2.7: Jumlah Data Peserta LPA Wiyata Dharma Terdaftar Program Askesos.	77
Tabel 3.1: Kewenangan Implementer Program Askesos	91
Tabel 3.2: Kegiatan Sosialisasi Program Askesos Tahun 2013.....	99
Tabel 3.3: Kegiatan Pendataan Calon Pelaksana dan Peserta Askesos	103
Tabel 3.4: Kegiatan Bimbingan dan Motivasi Peserta Askesos	110
Tabel 3.5: Kegiatan Pemantapan Pelaksana Askesos dan Petugas Kabupaten/Kota	114
Tabel 3.6: Peran Implementer dalam Pelaksanaan Askesos	131
Tabel 3.7: Perbedaan dan Kesamaan Program Askesos Skema Lama dan Askesos <i>new initiative</i>	131

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1: Struktur Organisasi dan Pejabat Penanggung Jawab Dinas Sosial DIY..	48
Bagan 2.2: Struktur Organisasi Sosial Paguyuban Petugas Parkir Malioboro-A.Yani (PPMAY).....	59
Bagan 2.3: Struktur LPA Paguyuban Petugas Parkir Malioboro-A.Yani	65
Bagan 2.4: Struktur LKS Sekaringtyas Kelurahan Banguntapan	67
Bagan 2.5: Struktur Organisasi LPA Sekaringtyas	69
Bagan 2.6: Struktur Organisasi LKS Wiaya Dharma 1 Sleman Periode tahun 2013	71
Bagan 2.7: Struktur Organisasi LPA Wiyata Dharma	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Proses Implementasi.....	21
Gambar 1.2: Dampak Langsung dan Tidak Langsung terhadap Implementasi	27
Gambar 3.1: Proses Implementasi Program Askesos	88
Gambar 3.2: Alur Birokrasi Pelaksanaan Askesos 2013	154

DAFTAR SINGKATAN

- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- ASEAN : *Association of Southeast Asian Nation*
- Askes : Asuransi Kesehatan
- Askesos : Asuransi Kesejahteraan Sosial
- BKSP : Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi
- BLT : Bantuan Langsung Tunai
- BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- BUMN : Badan Usaha Milik Negara
- CDS : *Community Development Session*
- IDT : Inpres Desa Tertinggal
- Jamkesmas : Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Jamsostek : Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- JKK : Jaminan Kecelakaan Kerja
- JKM : Jaminan Kematian
- JHT : Jaminan Hari Tua
- KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
- KTKPM : Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
- KUBE : Kelompok Usaha Bersama
- LKS : Lembaga Kesejahteraan Sosial
- LPA : Lembaga Pelaksana Askesos
- Orsos : Organisasi Sosial
- PBI : Penerima Bantuan Iuran
- PKH : Program Keluarga Harapan

PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PMB	: Pekerja Migran Bermasalah
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMTAS	: Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah
PNPM	: Program Nasional Perberdayaan Masyarakat
PSI	: Pekerja Sektor Informal
PSM	: Pekerja Sosial Masyarakat
Raskin	: Beras Miskin
RTSM	: Rumah Tangga Sangat Miskin
SDM	: Sumber Daya Manusia
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
SOP	: <i>Standard Operation Procedure</i>
Taspen	: Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil
TKSK	: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
UEP	: Usaha Ekonomi Produktif
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
WKSBM	: Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “*Implementasi Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) New Initiative Bagi Pekerja Mandiri Sektor Informal di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014*”. Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul tersebut maka peneliti perlu menegaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut. Adapun istilah yang perlu ditegaskan yaitu:

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.¹

2. Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) *New Initiative*

Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) adalah sistem perlindungan sosial bagi pekerja *sektor informal* yang berpenghasilan rendah atau miskin dan berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga, dalam bentuk jaminan pengganti pendapatan yang disebabkan peserta atau tertanggung mengalami penurunan maupun kehilangan pendapatan akibat kecelakaan kerja dan meninggal dunia.²

¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 529.

² Kementerian Sosial RI Direktorat Jaminan Sosial dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Buku Saku Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)*, (Kementerian Sosial RI, 2012), hlm. 1

Pelaksanaan program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) menurut Kementerian Sosial RI. terdiri dari dua jenis yaitu:³

- a. Asuransi skema lama sudah berjalan sejak tahun 2003 sampai 2011.

Pelaksanaan Askesos skema lama ini dikelola langsung oleh organisasi sosial dan kegiatan asuransi berbasis komunitas.

- b. Askesos *New Initiative* atau skema baru mulai berjalan pada tahun 2012.

Pelaksanaan program Askesos *New Initiative* merupakan perubahan penyempurnaan dari pelaksanaan program Askesos skema lama. Gagasan baru model Askesos ini, dimodifikasi atau skema pengelolaannya yang semula langsung dikelola oleh lembaga sosial/organisasi sosial, kemudian beralih kepada PT. Jamsostek (Persero). Dan saat ini organisasi sosial berperan sebagai Lembaga Pelaksana Askesos (LPA), yang berfungsi sebagai wadah atau perujuk data peserta kepada PT. Jamsostek (Persero) sebagaimana prosedur atau mekanisme yang telah ditetapkan.

Adapun program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) dalam penelitian ini adalah Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) *New Initiative* di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2014.

3. Pekerja Mandiri *Sektor Informal*

Pekerja *sektor informal* adalah orang atau pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri, dengan modal yang sangat terbatas dan atau rentan terhadap setiap perubahan sosial ekonomi dalam

³ Wawancara dengan Bapak Budi, Ketua Seksi KTKPM dan Jamsos Dinas Sosial Yogyakarta, di Dinas Sosial Yogyakarta, pada hari Selasa 18 Maret 2014.

rangka memperoleh penghasilan, guna memenuhi kebutuhan dasar secara layak.⁴

Pekerja *sektor informal* menurut Hesti R Wijaya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok:⁵

- a. Pengusaha atau sebagai pemilik usaha *informal* dan pemilik sekaligus operator dari pengusaha mandiri.
- b. Pekerja mandiri atau kepala dari bisnis keluarga, orang yang memperkerjakan diri sendiri, tenaga kerja berasal dari keluarga sendiri dan tidak dibayar.
- c. Buruh upahan atau pekerja dari perusahaan *informal* seperti pekerja kasual, pekerja rumahan, pembantu rumah tangga, pekerja paruh waktu dan pekerja tidak terdaftar.

Namun lebih jelasnya pekerja *sektor informal* yang dimaksud dalam penelitian ini lebih menyerupai kategori kedua dan ketiga, dan pekerja *sektor informal* merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga, seperti para buruh, tukang kayu, kuli bangunan, tukang becak, nelayan dan lain-lain yang masuk dalam kategori keluarga miskin atau berpenghasilan rendah. Penghasilan pekerja *sektor informal* dalam program Askesos *new initiative* tersebut

⁴ Kementerian Sosial RI Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Umum Asuransi Kesejahteraan Sosial* (Askesos), (Kementerian Sosial, 2012), hlm.8

⁵ Hesti R Wijaya, “Sektor Informal: Katub Pengaman dan Sang Penyelamat yang Terabaikan”, <http://fpbn3.blogspot.com/2008/09/sektor-informal-katup-pengaman-dan-sang.html> di akses pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 18.38 WIB

ditetapkan oleh pemerintah tiap pekerja sektor *informal* dianggap berpenghasilan Rp 1.200.000,-.⁶

Jadi maksud dari judul penelitian ini adalah pelaksanaan program Askesos skema baru pada tahun 2013-2014 yang diperuntukkan bagi pekerja mandiri sektor informal yang berpeghasilan rendah atau miskin di tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Latar Belakang Masalah

Ketenagakerjaan merupakan profesi yang digeluti oleh setiap orang. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencari nafkah, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain untuk dapat terpenuhinya kebutuhan hidup agar memperoleh hidup yang sejahtera, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Tidak semua profesi yang dijalani setiap orang memiliki kesamaan. Bermacam-macam jenis profesi mulai dari profesi sebagai pekerja *formal* seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), pekerja dibawah naungan lembaga atau kantor, pekerja dibawah naungan pabrik atau industri dan lain-lain, begitu juga profesi sebagai pekerja *informal* seperti tukang kayu, pedagang kaki lima, tukang batu, penjual koran, penyemir sepatu, nelayan, tukang becak dan lain-lain. Setiap pekerjaan memiliki tantangan dan resiko masing-masing yang tidak dapat diperkirakan, seperti resiko sakit akibat pekerjaan yang digeluti, resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

⁶ Wawancara dengan Bapak Novaria Sulistio, bagian Administrasi Informal khusus, di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang DIY, pada tanggal 11 September 2014.

Kecelakaan dan kematian dalam bekerja kerap kali terjadi baik pada pekerja *formal* maupun pekerja *informal*. Resiko tersebut tidak dapat dipungkiri bisa terjadi pada siapapun, kapanpun dan dimanapun, karena kedua keadaan tersebut sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Keadaan seperti ini bisa membuat risau dan tidak tenang dalam bekerja, apalagi jika yang berkerja merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga. Namun kedua keadaan tersebut diharapkan agar tidak terjadi, maka manusia harus tetap berupaya agar kecelakaan dalam bekerja sebisa mungkin dapat diantisipasi dan dihindari, serta kematian pun sebisa mungkin agar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, dengan adanya faktor permasalahan dalam bekerja tersebut agar para pekerja dapat menikmati pekerjaannya dengan tenang dari resiko yang mungkin bisa saja terjadi, maka dalam rangka membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia, PT.Jamsostek (Persero) berpartisipasi menangani berbagai permasalahan dalam mengurangi angka kecelakaan kerja, penyakit dan kematian akibat kerja. Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) memberikan asuransi kepada pekerja sektor formal berupa perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang pelaksanaannya ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Jamsostek (Persero) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja.

Menurut penjelasan Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja tersebut, jaminan sosial hanya dapat mencakup bagi para pekerja dalam *sektor*

formal. Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pasal 6 dijelaskan bahwa:

“BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.”

Kemudian pada pasal 16 ayat 1 telah dinyatakan bahwa:

*“Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”.*⁷

Dijelaskan pula dalam Undang-Undang No.40 tahun 2004 pasal 14 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), bahwa pada:

*“ Ayat (1): pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial. Ayat (2): penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Kemudian pada Ayat (3): ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”*⁸

Penjelasan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tersebut keluarga miskin dan tidak mampu masuk ke dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendapat jaminan kesehatan. Namun dari penjelasan Undang-Undang tersebut bagi para pekerja sektor informal khususnya pekerja mandiri keluarga miskin belum terangkul serta terpenuhi hak-hak mereka untuk dapat memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Sebagian besar pekerja di Indonesia merupakan pekerja di *sektor informal*, perlindungan dari kecelakaan

⁷ Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pasal 6 dan pasal 16 ayat 1

⁸ Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 14 ayat 1,2 dan 3

dan kematian akibat kerja juga sangat dibutuhkan bagi para pekerja *sektor informal*, karena kondisi kerja mereka terkadang sangat buruk tanpa adanya perlindungan sosial.

Berdasarkan data ketenagakerjaan yang dirilis dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja *sektor formal* di Indonesia pada tahun terakhir bulan Februari 2012 mencapai 42,1 juta orang (37,29 %), sedangkan sisanya adalah pekerja *sektor informal* yang mencapai 70,7 juta orang(62,71 %).⁹ Menurut Heru Prayitno, Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Yogyakarta pada 31 Desember 2013, data yang telah tercatat dalam BPJS Ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta pekerja *sektor formal* dan *informal* sebanyak 1,8 juta orang yang terdiri dari 30% pekerja *sektor formal* dan sisanya sebanyak 70% merupakan pekerja *sektor informal*.¹⁰ Jika dilihat jumlah data ketenagakerjaan tersebut, baik di Indonesia maupun di Daerah Istimewa Yogyakarta pekerja *sektor informal* lebih besar dibandingkan pekerja *sektor formal*.

Telah tercatat dalam data pengajuan 10 Lembaga Pelaksana Askesos (LPA) di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013, terdapat 5.850 orang tergolong sebagai pekerja mandiri *sektor informal* dalam kategori keluarga miskin, namun setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial DIY dan

⁹ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, “Keadaan Ketenagakerjaan”, <http://data.tnp2k.go.id/?q=content/keadaan-ketenagakerjaan-februari-2012-bag2>, diakses pada tanggal 27 Februari 2014 pukul, 12.23 WIB

¹⁰Antara, “25 Persen Pekerja Formal Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan”, <http://k3dkebumen.wordpress.com/2014/02/06/25-persen-pekerja-formal-terdaftar-bpjss-ketenagakerjaan/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2014, pukul 14.11 WIB

Kementerian Sosial RI sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, dalam rekapitulasi validasi jumlah peserta yang berhak menerima subsidi Askesos berjumlah 5.233 orang.¹¹

Dalam rangka upaya untuk memeratakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan mempromosikan pemberdayaan mitra sosial untuk berpartisipasi dalam sistem jaring pengaman sosial di negara-negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*), pada tanggal 5 sampai 7 Desember 2013 telah dibuka *Workshop ASEAN-Jepang* di Hotel Grand Aston Yogyakarta tentang “Skema Pengaturan Jaminan Sosial”. Utusan-utusan tersebut datang dari Vietnam, Filipina, Malaysia, Kamboja, Laos, Myanmar, Singapura dan negara Indonesia sendiri, dalam *workshop* tersebut mereka berdialog mengenai jaminan sosial bagi pekerja *formal* dan *informal* di Yogyakarta. Muchtar Lutfi Sekretaris Jendral Kementerian Tenaga Kerja dalam pembukaan *workshop* ASEAN-Jepang pada 6 Desember 2013 mengatakan “Sebagian besar pekerja *informal* di ASEAN tidak mendapatkan akses perlindungan jaminan sosial”¹².

Permasalahan mengenai akses perlindungan jaminan sosial tersebut, masih banyak pekerja *sektor informal* di beberapa Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum sepenuhnya memperoleh jaminan sosial. Maka dari itu untuk mengetahui implementasi program Askesos, peneliti mengambil sampel tiga kabupaten sebagai objek penelitian yaitu Kabupaten Sleman, Kota dan

¹¹Rekapitulasi hasil validasi calon penerima subsidi iuran Askesos tahun 2013 di Dinas Sosial Yogyakarta

¹²Muh Syaifullah, “Indonesia dan ASEAN Bahas Jamsostek di Yogyakarta”, <http://www.tempo.co/read/news/2013/12/06/173535247/Indonesia-dan-ASEAN-Bahas-Jamsostek-di-Yogyakarta> diakses pada tanggal 28 Februari 2014, pukul 14.15 WIB.

Bantul. Sesuai data di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.502 pekerja *sektor informal* didaftarkan sebagai peserta program Askesos yang memperoleh jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Sesuai dengan pasal 9 dan 10 Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja sektor informal keluarga miskin berupa Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Sistem jaminan sosial ditujukan agar dapat merata dan dapat mensejahterakan para pekerja mandiri *sektor informal* keluarga miskin yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga, mampu terpenuhi hak-haknya memperoleh jaminan kecelakaan, jaminan sakit dan kematian akibat kerja.

Inisiatif program pemerintah tersebut berawal dari Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) skema lama kemudian dilakukan evaluasi sehingga terbentuk program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) *new initiative* atau skema baru. Askesos skema baru ini merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang memberikan jaminan atas menurun dan hilangnya pendapatan keluarga disebabkan pencari nafkah utama mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.¹³

Program Askesos sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2003, namun hingga saat ini masih dalam proses penyempurnaan skema dengan adanya perubahan-perubahan menuju terwujudnya kegiatan yang lebih baik dan benar.¹⁴

¹³Wawancara dengan Bapak Budi, ketua seksi KTKPM dan Jamsos Dinas Sosial Yogyakarta, di Dinas Sosial Yogyakarta, pada hari Selasa 25 Februari 2014.

¹⁴Kementerian Sosial RI Direktorat Jaminan Sosial dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Umum Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)* (Kementerian Sosial RI, 2012), hlm. 2

Pengelolaan program Askesos lama dari tahun 2003-2011 yang awalnya dikelola oleh Lembaga Sosial atau Organisasi Sosial, kemudian beralih diamanatkan oleh pemerintah diserahkan kepada PT. Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditetapkan bahwa yang boleh mengelola jaminan ketenagakerjaan adalah badan resmi BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Lembaga sosial atau organisasi sosial yang dulu berperan sebagai pengelola, saat ini lebih berperan sebagai Lembaga Pelaksana Askesos (LPA), menjadi wadah atau perujuk data peserta kepada PT. Jamsostek (Persero) atau BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan latar belakang kebijakan pemerintah tersebut maka program ini menarik untuk diteliti agar dapat diketahui bagaimana pelaksanaan program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) *new initiative* atau skema baru bagi pekerja mandiri *sektor informal* di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga nantinya dapat memenuhi hak-hak mereka dalam memperoleh jaminan sosial dan terwujudnya kesejahteraan bagi para pekerja *sektor informal*.

C. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah, yang menjadi pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) *new initiative* atau skema baru bagi pekerja mandiri *sektor informal* di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014?

2. Apa faktor yang mempengaruhi implementasi program Askesos *new initiative* di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian:

1. Tujuan

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara lain:

- a. Menggambarkan bagaimana pelaksanaan program pemerintah tentang Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) skema baru bagi pekerja mandiri *sektor informal* di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) *new initiative* di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis:

- a. Menambah wawasan dan sebagai sumber pengetahuan dalam ilmu kesejahteraan sosial tentang kebijakan pemerintah melalui proses berjalanya program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) skema baru.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Manfaat praktis:

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan ukur kebijakan pemerintah terhadap perubahan program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) lama menjadi Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) skema baru.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian dan penelaahan pustaka yang penyusun lakukan, terhadap literatur-literatur yang ada maka sepanjang pengetahuan penyusun, sudah ada karya tulis atau penelitian yang membahas tentang asuransi atau jaminan sosial bagi ketenagakerjaan dan program Asuransi Kesejahteraan Sosial, namun belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai implementasi program Asuransi Kesejahteraan Sosial *New Initiative* bagi keluarga miskin pekerja mandiri di *sektor informal*. Penelitian yang telah penyusun telaah mengenai Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) seperti:

Pertama, penelitian yang telah disusun oleh Sri Lestari yang berjudul “*Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Menurut Perspektif Peserta di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*”.¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari lebih membahas mengenai evaluasi program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) difokuskan pada satu lokasi yaitu Kabupaten Bantul. Pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) di Kabupaten Bantul hingga akhir tahun 2011

¹⁵ Sri Lestari, “*Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Menurut Perspektif Peserta di Kabupaten Bantul Provinsi D.I. Yogyakarta*”, Tesis, tidak diterbitkan (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta Sunan Kalijaga, 2012).

telah dilaksanakan oleh organisasi sosial dan pelaksanaannya belum dapat dikatakan berhasil meskipun masyarakat pekerja informal telah termotivasi untuk menjadi anggota peserta Askesos, kemudian yang menjadi peserta Askesos masih belum mencapai maksimal karena hanya berkisar sebanyak 130 hingga 170 peserta saja tiap organisasi sosial karena masih banyak pekerja sektor informal yang belum mengetahui mengenai program Askesos.

Kedua, penelitian yang dilakukan Eny Hikmawati. dkk, yang berjudul “*Pengkajian Efektifitas Asuransi Kesejahteraan Sosial*”.¹⁶ Berbeda dari penelitian Sri Lestari yang memfokuskan pada satu daerah kabupaten, penelitian yang dilakukan Eny Hikmawati. dkk, lebih bersifat nasional karena tidak berfokus pada satu provinsi atau daerah saja melainkan pada lima Propinsi seperti Jawa Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Lampung dan Sulawesi Utara. Dalam penelitian Eny Hikmawati. dkk, lebih memberatkan pada pembahasan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Askesos. Hasil penelitian Eny Hikmawati. dkk, menjelaskan bahwa efektivitas program Askesos dapat dilihat dari beberapa aspek: a) aspek kelembagaan atau organisasi, b) aspek sumber daya manusia, c) aspek manajemen, d) kemampuan pengelola dalam manajemen program Askesos dan pemilihan sarana guna penumbuhan akseptabilitas program, e) ditinjau dari manfaat (*outcome*) serta dampak (*impact*) bagi peserta Askesos.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhtar dan Habibullah yang berjudul “*Evaluasi Program Jaminan Kesejahteraan Sosial: Asuransi*

¹⁶Eny Hikmawati. dkk, “*Pengkajian Efektifitas Asuransi Kesejahteraan Sosial*”, (Yogyakarta: B2P3KS PRESS, Cetakan pertama, 2009).

Kesejahteraan Sosial, di Empat Daerah Indonesia".¹⁷ Penelitian ini dilakukan di empat daerah yaitu Kabupaten Deli Serdang, Gunung Kidul, Gowa dan Kota Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses dan hasil pelaksanaan Program Askesos. Hasil penelitian Muhtar dan Habibullah menjelaskan bahwa dari sisi proses penentuan lokasi, kemitraan dan kepesertaan program, belum dilakukan secara maksimal karena dari empat lokasi penelitian terdapat satu lokasi instansi sosial Kota Ambon, tidak tahu adanya program Askesos di daerahnya, bahkan tidak pernah merasa mengusulkan dan tidak dilibatkan. Hasil dari kegiatan Askesos di empat daerah tersebut ditemukan bahwa pemahaman manfaat program Askesos bagi para pelaksana dan peserta Askesos sebagai tempat usaha simpan pinjam uang kepada pengelola. Dampak Askesos bagi perkembangan sosial ekonomi peserta (sebenarnya) positif, namun program tidak pada formatnya sebagai Askesos yang bertujuan memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial , tetapi lebih pada bentuk semacam simpan pinjam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Chatarina Rusmiyati yang berjudul, “Asuransi Kesejahteraan Sosial: Jaminan Kesejahteraan Sosial Bagi Pekerja Sektor Informal ”.¹⁸ Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Lampung, bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Askesos, pendukung dan penghambat serta manfaat bagi peserta Askesos di Provinsi Lampung. Sasaran subjek pada penelitian ini adalah pengurus lembaga pengelola Askesos dan

¹⁷Muhtar dan Habibullah, “Evaluasi Program Jaminan Kesejahteraan Sosial: Asuransi Kesejahteraan Sosial, di Empat Daerah Indonesia”, (Jakarta: BPP3KS Press, Cetakan pertama, 2009).

¹⁸Chatarina Rusmiyati, “Asuransi Kesejahteraan Sosial: Jaminan Kesejahteraan Sosial Bagi Pekerja Sektor Informal”, (Yogyakarta: B2P3KS PRESS, Cetakan Pertama, 2010)

peserta program Askesos. Hasil dari penelitian dijelaskan bahwa program Askesos yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kesejahteraan sosial bagi pekerja mandiri dan pekerja *disektor informal* yang sewaktu-waktu dapat mengalami penurunan dan kehilangan pendapatan akibat resiko sakit, meninggal, dan resiko sosial lainnya telah dilaksanakan oleh organisasi sosial atau lembaga sosial yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial sebagai penanggungjawab program Askesos dengan melalui tahap penjajakan, sosialisasi, identifikasi dan seleksi, temu konsultasi, pemantapan petugas, pembekalan manajemen bagi lembaga serta bimbingan motivasi serta pada pada tahap pelaksanaan yang meliputi pengelolaan Askesos, pembayaran klaim dan kemitraan, telah dilaksanakan dan dapat menjangkau sasaran program sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) yang telah dipaparkan, terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari adalah Sri Lestari lebih membahas pada evaluasi program Askesos skema lama pada tahun 2011, dan hasil program Askesos menurut peserta Askesos di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Eny Hikmawati. dkk, yaitu penelitian Eny Hikmawati. dkk, lebih bersifat nasional yang memfokuskan penelitiannya pada lima provinsi: Jawa Barat, Papua Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Sulawesi Utara mengenai efektifitas program Askesos. Penelitian

yang dilakukan oleh Muhtar dan Habibullah juga lebih bersifat nasional menganai evaluasi program Askesos di empat daerah: Deli Serdang, Gunung Kidul, Gowa dan Ambon. Penelitian yang telah dilakukan oleh Chatarina dilakukan di Provinsi Lampung mengenai pelaksanaan Askesos, namun yang menjadi subjek hanya kepada lembaga pengurus Askesos dan para peserta, karena Askesos lama yang mengelola adalah lembaga atau organisasi sosial. Perbedaan penelitian ini dari peneliti-peneliti sebelumnya adalah terletak pada fokus dan objek penelitiannya. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya semuanya merupakan penelitian program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) skema lama, sedangkan penelitian yang peneliti kaji adalah implementasi program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) *New Initiative* atau skema baru pada tahun 2013-2014 di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Askesos skema baru tersebut diterapkan dan mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Askesos *new initiative*.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu rangkaian proses atau tahap dalam perumusan pembuatan kebijakan yaitu Identifikasi, Implementasi dan Evaluasi. Jika sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan menginjak pada tahapan implementasi. Sebagaimana telah

dipaparkan oleh Freeman dan Sherwood dalam Edi Suharto, mengemas proses pembuatan kebijakan hanya dalam tiga tahap yaitu: perencanaan kebijakan, pengembangan dan implementasi program, dan evaluasi.¹⁹

Implementasi kebijakan menurut Pressman dan Wildavsky dikutip oleh Erwan Agus dan Dyah Wati dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).²⁰

Erwan Agus dan Dyah Ratih pun memberi definisi bahwa:

Implementasi adalah kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implemter kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.²¹

Setelah melihat pendapat dari para ahli mengenai definisi implementasi, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan salah satu dari rangkaian proses atau tahap dalam perumusan atau pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh para implemter kepada kelompok sasaran, yang tujuannya

¹⁹Edi Suharto, “Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji masalah dan Kebijakan Sosial”, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 78

²⁰Erwan Agus dan Dyah Rati, “Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia”, (Yogyakarta: Gava Media, Cetakan Pertama, 2012), hlm.20

²¹Ibid, hlm. 21

adalah untuk mendistribusikan atau menjalankan kegiatan dari kebijakan atau program yang telah dikeluarkan dalam rangka mencapai dan mewujudkan hasil dan tujuan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam tujuan kebijakan atau program tersebut.

b. Tahapan Implementasi Kebijakan

Proses implementasi bermula sejak kebijakan ditetapkan atau memiliki payung hukum yang sah. Oleh sebab itu tahapan-tahapan dijadikan sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan maka sering disebut sebagai tahap paling penting. Darwin menyebutkan bahwa ada hal penting dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan yang dikutip oleh Joko Widodo yaitu: pendayagunaan sumber, keterlibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, managemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat bagi publik.²²

Joko Widodo menjabarkan lebih operasional mengenai implementasi suatu kebijakan publik, mencakup tiga tahap yaitu:²³

1) Tahap interpretasi (*Interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Didalam aktivitas kebijakan juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar masyarakat (*stakeholder*)

²²Joko Widodo, “*Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*”, (Malang: Banyumedia, Cetakan Pertama, 2007), hlm. 89

²³*Ibid*, hlm. 90-94

dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan yang telah ditetapkan.

2) Tahap pengorganisasian (*to Organized*)

Pada tahap pengorganisasian ini proses kegiatan lebih mengarah pada:

a) Pelaksana kebijakan

Pelaksana kebijakan yaitu Pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi, mana yang akan melaksanakan dan siapa pelakunya). Pelaksana kebijakan sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, dan pelaksana kebijakan mencakup: 1) Dinas, badan, kantor, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah. 2) Sektor swasta (*private sektor*). 3) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 4) Komponen Masyarakat. Penetapan pelaku kebijakan bukan hanya sekedar menetapkan lembaga dan siapa yang melaksanakan kebijakan akan tetapi juga menetapkan tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab dari masing-masing pelaku kebijakan.

b) Standar prosedur operasi (*Standard Operation Procedure ‘SOP’*)

Standar prosedur operasional digunakan sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar dapat mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan apa hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan, kemudian untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam sikap dan tindakan ketika berhadapan dengan permasalahan saat kebijakan dilaksanakan.

c) Sumber daya keuangan dan peralatan

Sumber daya keuangan yaitu berupa penetapan anggaran mencakup (berapa besar anggaran yang diperlukan, dari mana sumber, bagaimana penggunaan dan pertanggungjawabannya), kemudian penetapan sarana dan prasarana mencakup (peralatan apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan).

d) Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan

Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih menekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Jika pelaksanaan kebijakan lebih dari satu lembaga sebagai pelaku kebijakan. Maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang gunakan, baik menggunakan gaya kepemimpinan kolegal atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator.

e) Penetapan jadwal kebijakan

Penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan dan standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan yang dilihat melalui dimensi proses pelaksanaan kebijakan.

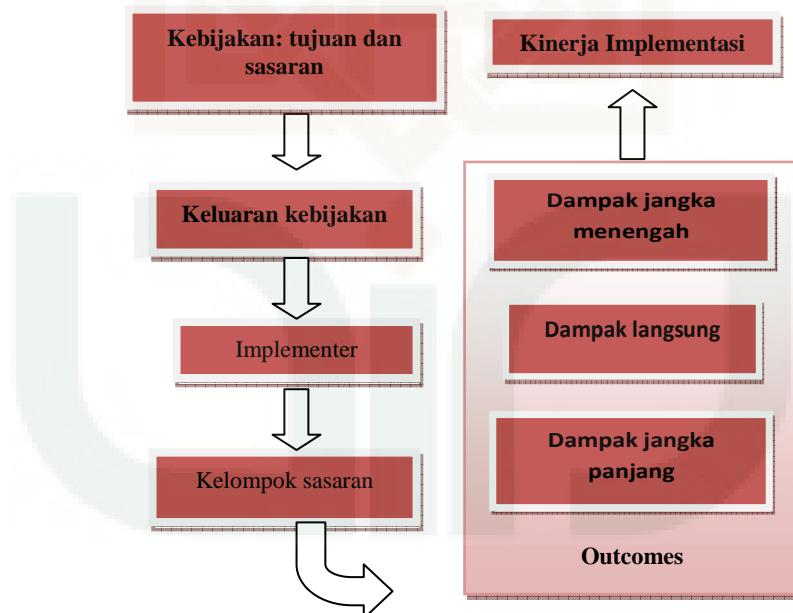
3) Tahap aplikasi (*Aplication*)

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan terencana proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata, tahap ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan interpretasi dan pengorganisasian.

Tahapan-tahapan dalam implementasi dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan yaitu: membentuk organisasi, mengerahkan orang, sumber daya, teknologi, menetapkan prosedur, dan seterusnya dengan tujuan agar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.²⁴

Proses implementasi berangkat dari adanya suatu kebijakan atau program dan prosesnya sangat panjang sebagaimana yang telah dilalui oleh para implemter dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan, dan telah dijelaskan pada pembahasan atas, maka proses panjang tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:²⁵

Gambar 1. 1Proses Implementasi



Sumber: Erwan Agus dan Dyah Rati, *Implementasi kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Gava Media, cetakan pertama, 2012, hlm. 72

²⁴Ibid, hlm. 64

²⁵Erwan Agus dan Dyah Rati, *Implementasi kebijakan Publik*, hlm.72

c. Faktor yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan dalam Proses Implementasi Kebijakan

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi, sebagai mana telah disebutkan oleh Sabatier dikutip oleh Erwan Agus dan Dyah Wati terdapat enam variabel utama yang dianggap memberi kontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi yaitu:

- 1) Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten.
- 2) Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan.
- 3) Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas dilapangan dan kelompok sasaran.
- 4) Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan.
- 5) Dukungan para *stakeholder*.
- 6) Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik.²⁶

Masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi yang telah teridentifikasi para ahli, namun faktor-faktor tersebut bersifat kontekstual, tergantung dimana penelitian tersebut mereka lakukan, seperti pendapat Makinde mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses implementasi di negara berkembang, dikutip juga oleh Erwan Agus dan Dyah Ratih yaitu:

- a) Kegagalan implementasi disebabkan oleh kelompok sasaran (*target beneficiaries*) tidak terlibat dalam implementasi program.

²⁶Ibid, hlm. 20

- b) Program yang diimplementasikan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.
- c) Adanya korupsi.
- d) Sumberdaya manusia yang kapasitasnya rendah.
- e) Tidak adanya koordinasi dan *monitoring*.²⁷

Ada banyak cabang ilmu pengetahuan memberikan kontribusi pada studi implementasi kebijakan, di dalam studi kebijakan terdapat banyak model implementasi yang dikutip oleh Riant Nugroho yaitu: model Van Meter dan Van Horn, model Mazmanian dan Sabatier, model Hoogwood dan Guun, model Goggin, model Grindle, model Elmore, dkk., model Edward III, dan model Nakamura dan Smallwood.²⁸ Setiap jenis kebijakan publik memerlukan model implementasi kebijakan yang berlainan, perlu ditekankan pula bahwa tidak ada model yang terbaik dari model-model implementasi tersebut. Keberhasilan maupun kegagalan dalam proses implementasi program Askesos skema lama menjadi skema baru, dapat peneliti ketahui menggunakan pendekatan implementasi menurut cara pandang Edward III. Pengaruh efektivitas implementasi yang diajukan oleh Edward III dalam model implementasi yang dikutip oleh Joko Widodo yaitu:²⁹

²⁷Ibid, hlm. 85

²⁸Riant Nugroho, “*Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*”, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, Cetakan Pertama, 2003), hlm. 503-512

²⁹Joko Wododo, *Analisis Kebijakan Publik*, hlm. 96-106

1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya yang dimaksud dalam implementasi kebijakan mencakup:

- a) Sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia harus bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dalam implementasi, kemudian harus cukup dengan adanya ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditangani. Selain itu sumber daya manusia harus memiliki keahlian dan memampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan).
- b) Sumber daya keuangan (anggaran) yaitu dana yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Karena jika anggaran yang tersedia terbatas dapat mengakibatkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada sasaran atau masyarakat menjadi terbatas.
- c) Sumber daya peralatan (*facility*) yaitu sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana-sarana yang digunakan untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Jika fasilitas

dan peralatan yang diperlukan dalam implementasi kebijakan terbatas maka dapat mengakibatkan kegagalan dalam implementasi.

- d) Sumber daya informasi dan kewenangan yaitu informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan dan informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kemudian kewenangan yang dimaksud yaitu adanya kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga yang dapat mempengaruhi lembaga itu sendiri dalam melaksanakan suatu kebijakan.

3. Disposisi atau Sikap (*Disposition*)

Disposition merupakan kemauan, keinginan yang kuat, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi dalam hal ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Struktur birokrasi juga mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi (*standard operating procedure*) yang dapat memudahkan dan

menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

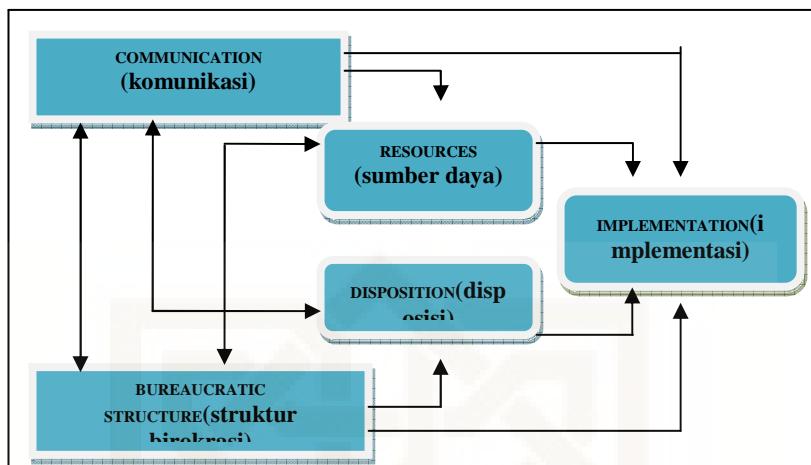
Hessel Nogi juga pernah menjelaskan secara khusus model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III mengatakan bahwa faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan terdapat empat faktor yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.³⁰

Berdasarkan pendekatan model Edward III tersebut, alasan peneliti menggunakan pendekatan ini bahwa, faktor tujuan dan sasaran, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi yang telah dijelaskan sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan publik. Maka untuk mengetahui hasil dari perubahan kebijakan program Askesos skema lama menjadi skema baru dan mengetahui implementasi program Askesos skema baru, kemudian peneliti menggunakan pendekatan ini. Secara skematik Erward III dikutip oleh Joko Widodo menggambarkan model proses implementasi kebijakan publik dapat dilihat pada gambar berikut:³¹

³⁰Hessel Nogi, “*Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*”, (Yogyakarta: Offset & YPAPI, Cetakan pertama, 2003).

³¹Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, hlm. 107

Gambar 1.2 Dampak Langsung dan Tidak Langsung terhadap Implementasi



Sumber: Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik, Malang: Banyumedia, Cetakan Pertama, 2007, hlm. 107

2. Tinjauan Ketenagakerjaan Sektor Informal

Sektor informal menurut Hidayat dikutip oleh Ali Achsan Mustafa, didefinisikan sebagai unit usaha berskala kecil yang memproduksi serta mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan dan pendapatan bagi dirinya masing-masing serta dalam usahanya dibatasi oleh faktor modal dan keterampilan.³²

Pekerja *Sektor Informal* (PSI) menurut Departemen Sosial adalah orang atau pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri dengan modal yang sangat terbatas dan atau rentan terhadap setiap perubahan sosial ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan dasar secara layak.³³

³²Ali Achsan Mustafa, *Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praksisi Pedagang Kaki Lima*, (Malang: In-Trans Publishing, Cetakan Pertama, 2008), hlm. 15.

³³Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Askesos*, hlm.8.

Hasil penelitian Sethurahman yang dikutip oleh Ali Ahsan dijelaskan bahwa kebanyakan kegiatan sektor informal sifatnya masih subsistem, oleh karena itu sektor informal dapat diartikan sebagai unit usaha bersekala kecil yang menghasilkan dan menciptakan kesempatan kerja untuk pendapatan bagi diri sendiri sehingga usahanya itu sangat dihadapkan dengan berbagai kendala seperti: modal fisik, faktor pengetahuan dan faktor keterampilan.³⁴

Oleh karena itu pekerja sektor informal dapat diartikan sebagai tenaga kerja yang beraktivitas dalam unit usaha yang memproduksi serta mendistribusikan berupa barang atau jasa secara mandiri dengan modal yang sangat terbatas untuk menciptakan dan menghasilkan pendapatan agar dapat mencukupi kebutuhan dasar secara layak bagi dirinya sendiri dan kegiatannya tidak berpatokan pada usaha berbadan resmi. Seperti wiraswasta, buruh harian, usaha yang dijalankan oleh keluarga, dan mempekerjakan anggota keluarga tanpa dibayar.

Salah satu ciri sektor informal adalah mudah masuk dan keluar dari suatu subsektor ke subsektor yang lain. Para pekerja sektor informal sering berganti atau beralih pekerjaan untuk sekadar menjajagi dimana subsektor yang paling dan lebih menguntungkan, dan sering terjadinya peralihan pekerjaan dalam rangka mencari subsektor mana yang lebih menguntungkan.³⁵ Namun dari penjelasan tersebut karena para pekerja sektor informal sering berganti dan beralih pekerjaan untuk dapat mencari subsektor mana yang lebih menguntungkan maka lebih

³⁴Ali Achsan, *Transformasi Sosial Sektor Informal*, hlm.8.

³⁵*Ibid*, hlm 8

rentan pula kondisi dan lingkungan mereka terhadap resiko yang dihadapi.³⁶

Perbedaan karakteristik antara sektor formal dan sektor dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1.1
Karakteristik Sektor Formal dan Sektor Informal

No	Karakteristik	Sektor Informal	Sektor Formal
1	Skala usaha	Kecil dan tidak berbadan hukum	Menengah hingga besar dan berbadan hukum
2	Sifat dunia usaha	Berdikari	Sangat tergantung dari perlindungan pemerintah atau impor
3	Kelayakan usaha	Tidak ada atau seadanya	Ada dan diprioritaskan
4	Pembukuan usaha	Tidak ada atau sederhana	Ada sesuai standar
5	Perencanaan usaha	Sambil jalan	Ada dan terus menerus
6	Permudalan	Kecil	Menengah hingga besar milik sendiri atau patungan
7	Sumber modal	Milik sendiri atau patungan Bank plecit (lembaga keuangan tidak resmi)	Bank umum (lembaga keuangan resmi)
8	Perputaran modal	Lambat	Cepat
9	Pengakuan negara	Tidak ada atau kecil	Diakui
10	Perlindungan hukum	Tidak ada atau kecil	Dilindungi
11	Bantuan negara	Tidak ada atau tidak sampai	Rutin
12	Izin usaha	Tidak resmi	Resmi dari negara
13	Pemberi izin	RT/RW/tetangga usaha	Negara
14	Unit usaha	Mudah berganti	Relatif tetap
15	Kegiatan usaha	Kurang terorganisasi	Sangat terorganisasi
16	Organisasi	Kekeluargaan	Birokrasi
17	Serikat buruh	Tidak berperan	Sangat berperan
18	Bantuan pemerintah	Tidak ada	Penting untuk kalangan usaha
19	Hubungan dengan desa/masyarakat	Saling menguntungkan	Usaha <i>one way traffik</i> untuk kepentingan sektor formal
20	Teknologi yang digunakan	Sederhana dan padat karya	Modern dan padat modal
21	Pendidikan	Tidak begitu diperlukan	Sangat diperlukan

³⁶Ibid, hlm 16

	formal		
22	Keterampilan	Lebih banyak bukan dari lembaga formal	Dididik oleh lembaga formal
23	Jam kerja	Tidak tentu	Sudah tertentu
24	Stok barang	Sedikit hingga sedang	Sedang hingga besar
25	Kualitas barang	Rendah hingga menengah	Standar
26	Omzet	Tidak tentu dan sulit diprediksi	Tidak tentu namun dapat diprediksi
27	Khalayak sasaran	Kelas bawah, menengah hingga keatas	Kelas bawah, menengah hingga keatas
28	Jumlah karyawan	Tidak lebih biasanya sampai 5 orang	Tidak tentu biasanya lebih dari 5 orang
29	Hubungan kerja	Kekeluargaan dan saling percaya	Berdasarkan kontrak kerja yang disepakati
30	Tenaga kerja	Kekeluargaan, teman atau tetangga	Bebas memilih karyawan sesuai yang dibutuhkan
31	Tempat usaha	Mudah berpindah-pindah dan sempit	Permanen dan rata-rata luas
32	Kontribusi terhadap negara	Relatif kecil dan mudah dimasuki	Relatif besar dan sulit dimasuki

Sumber: Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praksisi Pedagang Kaki Lima, Malang , In-Trans Publishing, Cetakan Pertama 2008, hlm.16

3. Tinjauan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)

a. Pengertian Asuransi Kesejahteraan Sosial

Asuransi Kesejahteraan sosial (Askesos) menurut Departemen Sosial dikutip oleh Muhtar dan Habibullah, didefinisikan sebagai suatu sistem asuransi sosial untuk memberikan perlindungan atau pertanggungan bagi warga masyarakat terhadap resiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama meninggal, menderita sakit, mengalami kecelakaan, dan berada dalam kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anggota keluarga.³⁷

³⁷Muhtar dan Habibullah, *Evaluasi Program Jaminan Sosial*, hlm. 23.

Menurut Suharto dikutip oleh Chatarina Rusmiyati Pemerintah Indonesia telah menerapkan lima komponen perlindungan sosial yaitu:³⁸

- a. Kebijakan pasar kerja melalui program Padat Karya, IDT dan PNPM, untuk memfasilitasi pekerjaan dan beroperasinya hukum penawaran dan permintaan kerja secara efisien. Sasarannya pekerja sektor formal, informal maupun pengangguran.
- b. Bantuan sosial melalui program Raskin dan BLT, sebagai jaminan sosial yang berbentuk tunjangan uang, barang atau pelayanan kesejahteraan. Sasarannya adalah kelompok rentan yang tidak memiliki penghasilan layak meliputi keluarga miskin, pengangguran, penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia, yatim piatu.
- c. Asuransi sosial melalui program Askes, Jamsostek, Taspen dan program sejenis, sebagai jaminan kesejahteraan sosial meliputi asuransi kesehatan, tenaga kerja, kecelakaan kerja, kecacatan, hari tua, pensiun, dan kematian. Asuransi diberikan kepada para peserta sesuai kontribusi premi atau tabungan yang dibayarkannya.
- d. Jaring pengaman sosial berbasis masyarakat atau Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), melalui program Askemos dan BKSP, sebagai perlindungan sosial yang diarahkan untuk mengatasi kerentanan masyarakat kecil baik di desa maupun di perkotaan.
- e. Perlindungan anak melalui program PMTAS dan PKH, sebagai perlindungan sosial yang diarahkan untuk menjamin perkembangan

³⁸Chatarina Rusmiyati, “Asuransi Kesejahteraan Sosial” hlm. 10

kualitas angkatan kerja dimasa depan yang sehat dan produktif, meliputi pendidikan anak usia dini, beasiswa, pemberian makanan sehat di sekolah, perbaikan gizi, imunisasi anak dan tunjangan warga.

Asuransi Kesejahteraan Sosial merupakan bentuk dari program asuransi sosial dan WKSBM.³⁹ Asuransi Kesejahteraan Sosial merupakan suatu jaminan sosial sebagai wujud perlindungan atau sekuritas sosial, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 pasal 5 ayat 1 tentang Kesejahteraan Sosial, menjelaskan bahwa kemiskinan menjadi salah satu yang diprioritaskan menjadi sasaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan dijelaskan pada ayat 6 penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pada pasal 9 ayat 1 dan 2, jaminan sosial tersebut sebagaimana dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jaminan sosial yang dimaksud berupa program asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. Pada pasal 10 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya, asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana

³⁹*Ibid*, hlm. 12

dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial tersebut adanya asuransi kesejahteraan sosial telah diberikan kepada keluarga miskin Pekerja Sektor Informal (PSI) dimana pencari nafkah utama dalam keluarga mengalami kecelakaan atau meninggal dunia.

b. Tujuan dan Manfaat Askesos

Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) menurut Kementerian Sosial RI bertujuan untuk:⁴⁰

1. Memberikan jaminan dan perlindungan bagi PMKS, yakni keluarga miskin yang mencari nafkah utamanya bekerja pada sektor informal dalam menghadapi “goncangan dan tekanan” (*shocks and stresses*) atau resiko yang terjadi untuk mengganti penghasilan yang hilang atau menurun selama kurun waktu tertentu akibat pencari nafkah utama mengalami kecelakaan, sakit atau kematian, sehingga usaha dan kehidupan keluarga tetap dapat terjamin dan bahkan terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga.
2. Menumbuhkan dan meningkatkan budaya hemat, budaya menabung, dan pentingnya perencanaan hidup masa depan dikalangan keluarga miskin pekerja sektor informal.

⁴⁰Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Askesos Tahun 2012*, hlm. 12

3. Membangun dan mengembangkan modal sosial (*social capital*) seperti, kepercayaan, jaringan, kegotongroyongan melalui kegiatan kelompok dan pendampingan.

Manfaat program Askesos menurut Kementerian Sosial RI dibedakan menjadi dua kategori yaitu:⁴¹

1. Jangka pendek: memberikan rasa aman (*psychological security*) bagi pekerja sektor informal dikarenakan sudah tersedianya jaminan ketika suatu saat mengalami kecelakaan kerja yang membutuhkan biaya sekaligus ketika perawatan tersebut menyebabkan terhentinya aktivitas kerja dan meninggal dunia, disamping itu akan dapat menimbulkan semangat dan fokus bagi pekerja sektor dalam hal melaksanakan pekerjaannya.
2. Jangka panjang: keluarga tidak dibebani oleh permasalahan akibat kecelakaan kerja atau meninggal dunia yang dialami kepala keluarga sebagai pencari nafkah utama, namun sebaliknya akan mendapatkan bantuan dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh anggota keluarganya ketika terhentinya aktivitas kerja pencari nafkah utama akibat kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

Tujuan dan manfaat Askesos dalam hal ini adalah memberikan jaminan ketika pencari nafkah utama mengalami kecelakaan atau meninggal dunia sehingga pada akhirnya pemenuhan kebutuhan dasar keluarga dapat terpenuhi dan dapat mencegah terjadinya kondisi keluarga yang lebih miskin. Program

⁴¹Kementerian Sosial, *Buku Saku Askesos Tahun 2012*, hlm.3

Askesos diperuntukkan untuk menjaga kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut tidak jatuh akibat resiko yang dialami dan diberikan dalam rangka mengganti pendapatan pencari nafkah utama keluarga yang hilang atau menurun, mempertahankan pendapatan, dan menopang keberlangsungan kehidupan keluarga.

c. Mekanisme Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial

Mekanisme dalam pelaksanaan program Askesos *new initiative* melalui proses panjang. Mekanisme pelaksanaan Askesos ditetapkan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:⁴²

1. Sosialisasi program Askesos.
2. Observasi, seleksi dan penetapan yayasan/organisasi sosial pelaksana LPA
3. Seleksi peserta
4. Seleksi dan penetapan pendamping Askesos
5. Bimbingan motivasi peserta Askesos
6. Bimbingan teknis dan supervisi bagi Lembaga Pelaksana Askesos (LPA)
7. Pengendalian, pelaksanaan tabungan dan CDS
8. Tahap pengajuan manfaat

Selain dari tahap-tahap tersebut, dilakukan juga tahap pengendalian yang mencakup kegiatan: supervisi, monitoring, evaluasi dan laporan.⁴³

Mekanisme pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) *New Initiative* dapat berjalan dengan baik ditentukan dengan adanya pendukung

⁴²Kementerian Sosial RI Direktorat Jaminan Sosial dan Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Umum Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)*, (Kementerian Sosial RI, 2013), hlm 47-52

⁴³*Ibid*, hlm. 53

dalam pelaksanaan, oleh karena itu dibutuhkan tim pendukung dalam mengelola Administrasi kegiatan program askesos yaitu Tim pengendali tingkat Provinsi, Tim pengendali tingkat kabupaten/kota, Tim pendamping untuk mengawal pelaksanaan kegiatan program Askesos, Tim pelaksanapada tingkat komunitas serta Tim pengelola dana program Askos BPJS Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan.⁴⁴

d. Kepesertaan Askesos

Kategori kepesertaan yang dinyatakan dalam program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askos) dalam Kementerian Sosial RI yaitu dengan syarat ketentuan sebagai berikut:⁴⁵

1. Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program Askos adalah pencari nafkah utama dalam keluarga, berasal dari keluarga miskin, maksimal berusia 55 tahun, dan bekerja di sektor informal.
2. Dan pekerja sektor informal yang dimaksud dengan ciri-ciri sebagai berikut: (i) berskala mikro dengan ukuran kecil, (ii) menggunakan teknologi sederhana atau rendah, (iii) menghasilkan barang dan/atau jasa dengan kualitas relatif rendah, (iv) tempat usaha tidak tetap, (v) mobilitas tenaga kerja sangat tinggi, (vi) kelangsungan usaha tidak terjamin, (vii) jam kerja tidak teratur, (viii) tingkat produktifitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap.

⁴⁴Kementerian Sosial RI Direktorat Jaminan Sosial dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi*, (Kementerian Sosial RI, 2013), hlm. 131

⁴⁵Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Pengelolaan dan manajemen Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askos) Tahun 20012*, hlm. 5

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari proses penelitian disajikan kedalam bentuk kalimat-kalimat. Hasil penelitian kualitatif deskriptif ini berisi kutipan-kutipan dari data-data. Data-data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi dan resmi, memo, gambar dan rekaman-rekaman resmi lainnya.⁴⁶

Jenis penelitian ini digunakan oleh peneliti agar dapat memberikan pemahaman dan penafsiran secara mendalam mengenai keadaan dan fakta yang relevan dari implementasi program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) *new initiative* atau skema baru di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Subjek dan Objek

Penentuan subjek dan objek penelitian dilakukan oleh peneliti untuk mempermudah peneliti melakukan proses penelitian, maka subjek dan objek dalam penelitian ini adalah:

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian (informan penelitian) adalah orang yang menjadi sumber informan dan memahami objek penelitian.⁴⁷ Subjek penelitian yang dipilih sebagai sumber informan dalam penelitian ini adalah:

⁴⁶ Emzir, “*Metode Penelitian kualitatif Analisis Data*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 3.

⁴⁷ Burhan Bungin, “*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*”, (Jakarta Kencana, cetakan kedua, 2008), hlm. 76

- 1) Dua orang staf atau pegawai Dinas Sosial Daerah Istimewa di seksi KTKPM yaitu Bapak Budi Wibowo ketua seksi KTKPM dan Jamsos serta Ibu Lilis Penanggung Jawab Pengelola Program Askesos di Seksi KTKPM.
- 2) Tiga orang pendamping para peserta Askesos yaitu Ibu Tina, Ibu Isrianti, Ibu Lasmini dari masing-masing LPA Paguyuban Petugas Parkir, LPA Wiyata Dharma dan LPA Sekaringtyas.
- 3) Lima orang pelaksana program Askesos di Lembaga Pelaksana Askesos (LPA) dari masing-masing Kabupaten Sleman, Kabupaten Kota dan Kabupaten Bantul yaitu dari LPA Paguyuban Petugas Parkir ada Bapak Hanarto sebagai ketua LPA dan Bapak Sugik Sugihartono sebagai bendahara, dari LPA Sekaringtyas ada ibu Sumiartinah sebagai ketua, kemudian dari LPA Wiyata Dharma ada Bapak Edi Surata sebagai ketua dan Ibu Iswariyatun sebagai sekretaris
- 4) Peserta Askesos yaitu tiga orang ahli waris peserta Askesos yang mengajukan klaim dan tiga orang peserta non klaim.
- 5) Satu orang Staf atau Pekerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yaitu Bapak Novaria Sulistyo bagian administrasi informal khusus.

Teknik pengambilan sampel yang dijadikan informan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak memberi kesempatan yang sama bagi setiap

unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel.⁴⁸ Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan jenis *snowball sampling* dan *purposive sampling*. *Snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlah sumber data hanya sedikit, namun dapat menjadi besar karena dari jumlah sumber data yang sedikit belum mampu memberikan data yang memuaskan, (misalnya peneliti telah menentukan A sebagai orang pertama sumber data, namun oleh A disarankan ke B dan C, kemudian dari B dan C belum memperoleh data yang lengkap maka peneliti ke F dan ke G), sedangkan *purposive sampling* adalah pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, (misalnya mengambil orang yang paling tahu berkaitan dengan apa yang diteliti atau sumber data berperan sebagai penguasa yang dapat mempermudah dalam proses penelitian).⁴⁹

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) *new Initiative* tahun 2013-2014 di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Validitas Data

Validitas data merupakan unsur terpenting dalam penelitian, untuk mengetahui kevaliditasan data hasil penelitian maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai penggabungan data dari berbagai teknik

⁴⁸Emzir, “Metode Penelitian kualitatif Analisis Data”,hlm. 53

⁴⁹Ibid, hlm. 54

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁵⁰ Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yaitu data didapat dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁵¹ Triangulasi sumber data ini peneliti gunakan sebagai uji keabsahan data yaitu dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda, contohnya wawancara kepada Dinas Sosial DIY, BPJS Ketenagakerjaan, LPA, pendamping dan peserta mengenai komunikasi, sumber daya, sikap para pelaku kebijakan, struktur birokrasi, kemudian dicroscek antara sumber yang satu dengan yang lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data digunakan untuk mendapatkan hasil data yang dapat dipercaya kebenarannya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap (kejadian, fenomena, gejala, atau setuasi), dengan maksud dan tujuan untuk menafsirkan, mengungkapkan faktor-faktor penyebab, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengatur ‘kejadian, fenomena, gejala, atau sesuatu’ tersebut.⁵² Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi non partisipan yaitu peneliti berperan sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang

⁵⁰Sugiono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima, 2009), hlm. 83

⁵¹*Ibid*, hlm. 83

⁵²*Ibid*, hlm.38.

diamati.⁵³ Observasi ini dilakukan dalam bentuk peneliti mengamati kondisi lingkungan lokasi lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program Askesos dan sebagian pelaksanaan program askesos. Kegiatan yang peneliti observasi misalnya kegiatan *Community Development Session* (CDS), *monitoring* (pemantauan), cara atau pelayanan LPA dan Pendamping terhadap peserta Askesos.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi kepada informan yang diteliti terkait pendapat dan keyakinnya.⁵⁴ Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti berupa wawancara tak terstruktur atau terbuka. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka yaitu pelaksanaan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, namun yang digunakan oleh peneliti hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁵⁵ Oleh karena itu, untuk dapat memperoleh informasi yang lebih dalam peneliti harus menentukan informan atau partisipan dan mengajukan pertanyaan dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Askesos (seperti: dari pihak Dinas Sosial pelaksana Askesos, BPJS Ketenagakerjaan, lembaga pelaksana askesos, pendamping, dan peserta). Pemilihan informan atau partisipan yang

⁵³Basrowi dan Suwandi, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 109.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 50.

⁵⁵Sugiono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, hlm. 74

ditentukan peneliti bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menggali informasi, karena informan yang telah ditentukan dianggap mampu memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia.⁵⁶ Dokumen-dokumen yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dapat berupa deskripsi kerja, laporan tahunan, brosur informasi, buku, websites, surat kabar, transkrip, gambar dan dokumen-dokumen lain terkait dengan pelaksanaan program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos).

5. Teknik Analisis data

Data-data yang telah terkumpul dari hasil proses observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian peneliti analisis atau diolah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan, realita dan fakta yang ada. Daata data yang telah terkumpul tersebut, diseleksi dan disajikan, kemudian ditafsirkan secara sistematis agar dapat menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru yang disebut sebagai hasil temuan (*findings*).⁵⁷

Analisis dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:⁵⁸

- Reduksi data yaitu proses penyeleksian atau pemilihan semua data atau informasi dari lapangan yang telah diperoleh dari hasil proses wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait implementasi program Askesos. Reduksi

⁵⁶Basrowi dan Suwandi, “Memahami Penelitian Kualitatif”, hlm. 158

⁵⁷*Ibid*, hlm. 123

⁵⁸*Ibid*, hlm. 209

data berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

- b. Penyajian data yaitu menyusun data atau informasi yang diperoleh dari survei dengan sistematik sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan.
- c. Menarik kesimpulan atau verifikasi yaitu melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi, peneliti menetapkan kedalam beberapa bagian. Hal ini dilakukan agar pembahasan saling terkait dan menghasilkan penulisan dan penyusunan yang utuh dan sistematis. Isi skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Sistematika pembahasan bagian awal merupakan halaman judul, nota dinas dan pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi serta abstraksi.

Bagian utama terdiri dari:

Bab I, merupakan pendahuluan tentang penegasan istilah, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang gambaran umum Implementer Askesos *new initiative* di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: letak geografis, sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana program Askesos.

Bab III, berisi tentang hasil penelitian dan jawaban penelitian atas rumusan masalah yaitu implementasi program Askesos *New Initiative* atau skema baru bagi pekerja mandiri *sektor informal* di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab IV, sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis.

Bagian akhir dalam skripsi ini memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) *new initiative* pada tahun 2013-2014 di Tiga Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta direncanakan sejak tahun 2012. Proses implementasi Askesos *new initiative* melalui tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi. Tahap interpretasi dan pengorganisasian dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI, kemudian tahap aplikasi program Askesos dilaksanakan oleh beberapa implementer yaitu Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial DIY, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, BPJS Ketenagakerjaan, LPA dan pendamping melalui kegiatan 1) sosialisasi program Askesos, 2) observasi, seleksi dan penetapan yayasan/organisasi sosial pelaksana LPA, 3) seleksi peserta, 4) seleksi dan penetapan pendamping Askesos, 5) bimbingan motivasi peserta Askesos, 6) bimbingan teknis dan supervisi bagi Lembaga Pelaksana Askesos (LPA), 7) pendampingan dan pelaksanaan tabungan dan CDS, 8) tahap pengajuan manfaat, 9) tahap pengendalian.
2. Tahap pelaksanaan program Askesos *new initiative* saat di lapangan dipengaruhi dengan beberapa faktor antara lain:

- a. faktor komunikasi, komunikasi dari pembuat kebijakan kepada para implementer berjalan dengan lancar.
- b. Fakror sumber daya meliputi sumber daya manusia, keuangan, peralatan dan informasi. Sumber daya yang disediakan pemerintah menurut para informan sudah cukup memadai. Namun dari segi keuangan meskipun bagi peserta yang mengalami klaim mendapat dana klaim yang cukup membantu, menurut beberapa informan baik BPJS Ketenagakerjaan, LPA dan peserta keuangan yang dianggarkan pemerintah masih kurang cukup hal tersebut dikarenakan adanya ketetapan umur peserta maksimal 55 tahun dan masa pertanggungan yang hanya 12 bulan. Selain itu informasi yang disampaikan kepada pemerintah dalam kegiatan sosialisasi motivasi bagi seluruh peserta hanya mendatangkan 200an peserta tiap lembaga.
- c. Faktor disposisi atau sikap, sikap dari para implementer program Askesos sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai tugas pokok dan fungsinya, namun dari pihak BPJS Ketenagakerjaan masih telat membagikan kartu peserta Askesos dan mengakibatkan peserta bingung untuk apa kartu digunakan jika masa pertanggungan hampir habis.
- d. Faktor struktur birokrasi, struktur birokrasi dari berbagai pihak implementer berjalan dengan baik.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan rekomendasi kepada Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial DIY agar:

- a. Perlu dibentuk Tim Pelaksana Askesos dan Lembaga Askesos yang tetap selama 3 tahun berjalan pada tiap Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan agar lebih bisa memantau kekurangan dan kelebihan dalam kurun waktu yang lama.
- b. Perlu diadakan Pelatihan yang lebih dalam bagi para Pelaksana Program Askesos dan pendamping di setiap Lembaga Pelaksana Askesos, hal ini agar dapat meningkatkan profesionalitas para Pelaksana Program Askesos sebagai tim penanggungjawab pelaksanaan program Askesos. Serta dilakukan pengarahan dan pelatihan bagi Pelaksana Askesos dan pendamping untuk lebih dapat memberdayakan peserta askesos di tingkat komunitas.
- c. Diadakan Laporan Kegiatan bagi setiap Lembaga Pelaksana Askesos (LPA) selama berjalannya kegiatan 3 bulan sekali.
- d. Memperpanjang masa pertanggungan bagi LPA dan Peserta Askesos. Karena dengan singkatnya masa pertanggungan yang diberikan oleh pemerintah para Lembaga Pelaksana Askesos belum sepenuhnya memahami bagaimana kerja program Askesos, dan para pesertapun masih banyak yang belum mengetahui untuk apa program Askesos.
- e. Menambah syarat ketetapan usia bagi peserta Askesos dari usia 18-55 tahun menjadi 18-60 tahun. Karena sebagian besar pekerja sektor informal yang berumur 55- 60 tahun masih bekerja untuk menghidupi keluarga.
- f. Mengikutsertakan seluruh peserta Askesos dalam kegiatan pembekalan meskipun dibagi menjadi beberapa sesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achsan Mustafa, *Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praksisi Pedagang Kaki Lima*, Malang: In-Trans Publishing, Cetakan Pertama, 2008.
- Antara, “25 Persen Pekerja Formal Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan”, <http://k3dkebumen.wordpress.com/2014/02/06/25-persen-pekerja-formal-terdaftar-bpjks-ketenagakerjaan/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2014, pukul 14.11 WIB
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Chatarina Rusmiyati, *Asuransi Kesejahteraan Sosial: Jaminan Kesejahteraan Sosial Bagi Pekerja Sektor Informal*, Yogyakarta: B2P3KS PRESS, Cetakan pertama, 2010.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: CV. Alfabeta, 2012.
- Emzir, *Metode Penelitian kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Eny Hikmawati, dkk., *Pengkajian Efektifitas Asuransi Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: B2P3KS PRESS, Cetakan pertama, 2009.
- Erwan Agus dan Dyah Rati, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, Cetakan Pertama, 2012.
- Hessel Nogi, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*, Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, Cetakan pertama, 2003.
- Hesti R Wijaya, “Sektor Informal: Katub Pengaman dan Sang Penyelamat yang Terabaikan”, <http://fpbn3.blogspot.com/2008/09/sektor-informal-katup-pengaman-dan-sang.html> di akses pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 pukul 18.38 WIB
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Kementerian Sosial RI Direktorat Jaminan Sosial dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Buku Saku Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)*, Kementerian Sosial RI, 2012.

Kementerian Sosial RI Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Umum Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)*, Kementerian Sosial, 2012.

Kementerian Sosial RI Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Pedoman Umum Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)*, Kementerian Sosial, 2013.

Kementerian Sosial RI Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, *Petunjuk Pengolahan Dan Manajemen Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)*, Kementerian Sosial, 2012.

Muhtar dan Habibullah, *Evaluasi Program Jaminan Kesejahteraan Sosial: Asuransi Kesejahteraan Sosial, di Empat Daerah Indonesia*, Jakarta: P3KS Press, Cetakan pertama, 2009.

Muh Syaifullah, "Indonesia dan ASEAN Bahas Jamsostek di Yogyakarta", <http://www.tempo.co/read/news/2013/12/06/173535247/Indonesia-dan-ASEAN-Bahas-Jamsostek-di-Yogyakarta> diakses pada tanggal 28 Februari 2014, pukul 14.15 WIB

Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*, Malang: Intimedia Wisma Kali Metro, 2009.

Riant Nugroho D., *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Cetakan Pertama, 2003.

Sri Lestari, *Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Menurut Perspektif Peserta di Kabupaten Bantul Provinsi D.I. Yogyakartarta*, Tesis, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta Sunan Kalijaga, 2012.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, Cetakan Kelima, 2009

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, "Keadaan Ketenagakerjaan", <http://data.tnp2k.go.id/?q=content/keadaan-ketenagakerjaan-februari-2012-bag2>, diakses pada tanggal 27 Februari 2014 pukul 12.23 WIB

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

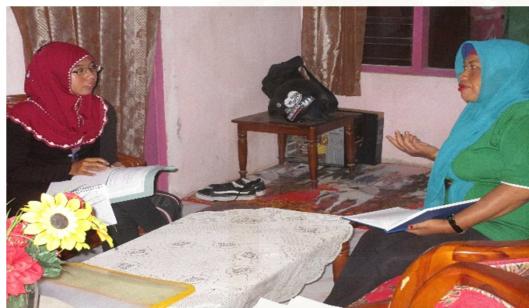
LAMPIRAN 1: FOTO-FOTO



1. Wawancara bersama bapak Edi Surata, Ibu Iswariatu dan bapak Suparjono di LPA Wiyata Dharma



4. wawancara bersama bapak Novaria Sulistyo bagian Administrasi Informal Khusus di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan DIY.



2. Wawancara bersama ibu Sulasmri Pendamping LPA Sekaringtyas dikediaman ibu Sulasmri



5. wawancara bersama bapak Hanarto Ketua LPA Paguyuban Petugas parkir di kediaman rumah bapak Hanarto.



3. Wawancara bersama ibu Tina Pendamping LPA Paguyuban Petugas Parkir di Kelurahan Mantrijeron



6. wawancara bersama ibu Sumiartinah Ketua LPA Sekaringtyas di kediaman ibu Sumiartinah.



7. Salah satu kegiatan CDS oleh Peserta Askesos di Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron.



8. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pengelola Dana Klaim program Askesos.



9. Kegiatan sosialisasi program Askesos



10. Peminjaman dokumen LPA dan berkas laporan kerja LPA.



11. Wawancara peserta Askesos pekerja sektor informal petugas parkir Malioboro dari LPA Paguyuban Petugas Parkir.



12. Wawancara bapak Hanarto bersama rekan kerja pekerja sektor informal peserta Askesos.



13. Kegiatan Sosialisasi program Askesos diisi oleh narasumber Bapak Budi Wibowo



14. Kegiatan sosialisasi program Askesos



15. LPA Wiyata Dharma Kabupaten Sleman.



16. LPA Paguyuban Petugas Paerkir Malioboro/A. Yani.



17. Pemantapan Pelaksana Petugas Kabupaten/ Kota di Inna Garuda Hotel pada 11 Juni 2013



18. Bimbingan Motivasi Peserta Askesos pada bulan Juli 2013 dihadiri oleh 200 peserta.



19. Sosialisasi Program jamsostek TK-LKH Askesos dari BPJS Ketenagakerjaan.

LAMPIRAN 2: KEGIATAN PEMANTAPAN PETUGAS

PEMANTAPAN PELAKSANA ASKESOS DAN PETUGAS KABUPATEN / KOTA

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Inna Garuda Yogyakarta tanggal 11 Juni 2013 yang dihadiri oleh Narasumber dari Kementerian Sosial R.I. ==Agustinus Sunarman== Kepala Seksi Kerjasama Non Pemerintah, Kepala PT Jamsostek (Persero) Cabang Yogyakarta, Kepala Bidang banjamsos Dinas Sosial D.I.Y.

Peserta pemantapan ini adalah Ketua Pengelola Lembaga Pengelola Askesos (LPA) sebanyak 10 orang dari Yayasan Bhakti Putra Mandiri Kec. Dlingo, Orsus Sekaringtyas Banguntapan, LKS Wiyata Dharma Sleman, LKM Caturharjo Sleman, Paguyuban Parkir Malioboro Yogyakarta, Orsus Arrif Kemadang, Orsus Marem Lendah, LPPM Bina Insan mandiri Yogyakarta, Yayasan Nurul Jadid Girimulyo. Semua Lembaga Pengelola Askesos ini didampingi para pendamping kegiatan. Orsus yang hadir dalam kegiatan ini adalah calon pengelola Askesos Skema Baru untuk tahun 2013.

Materi pemantapan kali ini adalah Review pelaksanaan Askesos di D.I.Y tahun 2012, Kebijakan Kementerian Sosial R.I., dalam Penyelenggaraan Program Askesos, Mekanisme dan Prosedur Askesos TK-LHK serta Tahapan Pelaksanaan Program Askesos.



Agustinus Sunarman dalam paparannya menyatakan, "Mestinya antara pendamping dan pengelola Askesos harus menjalin hubungan yang harmonis. Termasuk didalamnya dalam memanfaatkan jasa pungut / uang pembinaan dari PT. Jamsostek. Artinya, pendamping Lembaga Pelaksana Askesos juga menjadi bagian dari jasa pungut tersebut".

Sumber di Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Jaminan Sosial menyampaikan, tujuan dari pemantapan ini adalah menyatukan pemahaman tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan Askesos, kewenangan, hak dan kewajiban masing-masing komponen terkait. Dengan demikian nantinya diharapkan pelaksanaan askesos skema baru ini dapat terlaksana dengan baik. (wib'2013)

LAMPIRAN 3 MATERI SOSIALISASI PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

“Fokus Sosialisasi pada Perlindungan dan Jaminan Sosial Berupa Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)”

1. Askesos bukan sebagai asuransi kesehatan.
2. Komponen terkait pelaksanaan Askesos : 1) Orsos sebagai LPA; 2) Peserta; 3) Pendamping kegiatan; 4) BPJS Ketenagakerjaan; 5) Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Provinsi; 6) Kementerian Sosial RI.
3. Askesos adalah suatu jaminan sosial sebagai wujud perlindungan sesuai dengan amanat UU No. 11 tahun 2009 yang diberikan kepada keluarga miskin Pekerja Sektor Informal sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga mengalami kecelakaan kerja dan / atau meninggal dunia. Askesos diberikan dalam rangka mengganti pendapatan pencari nafkah utama keluarga yang hilang atau menurun (*income replacement*) yang disebabkan karena terjadinya kecelakaan kerja dan atau kematian sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, mempertahankan dan menopang tingkat pendapatan dan keberlangsungan kehidupan keluarga (*income maintenance*) melalui jaminan keberlangsungan kehidupan usaha ekonomi yang sudah dijalankan oleh keluarga, dan meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga (*income generating*) melalui tabungan peserta dan bantuan pertanggungan yang diterima.
4. Tujuan Askesos adalah mengganti penghasilan peserta dalam kurun waktu tertentu karena mengalami kecelakaan dan atau kematian, memelihara usaha ekonomi keluarga sehingga pendapatan tidak menurun, melatih anggota untuk menabung, membangun dan mengembangkan modal sosial.
5. Persyaratan peserta: 1) pencari nafkah utama yang bekerja pada sektor informal baik laki-laki atau perempuan; 2) diusulkan oleh instansi Kabupaten/Kota/Provinsi dalam proposal kegiatan; 3) boleh dari penerima manfaat program lain (KUBE, PKH, KTK, PM, Raskin, Jamkesmas, Jamkesos, Jamkesta, dsb); 4) dalam 1keluarga hanya 1 peserta, dengan hak dan kewajibannya: bersedia berlatih menabung, bersedia mengikuti CDS, umur antara 18 s.d 55 tahun.
6. Pekerja Sektor Informal adalah orang atau pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri dengan modal yang sangat terbatas dan atau rentan terhadap setiap perubahan sosial ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan **siapa memenuhi kebutuhan dasar secara lavak**

7. Jenis dan manfaat pertanggungan berupa: 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan bagi peserta atas kecelakaan yang dialami pada saat melakukan pekerjaannya mulai saat berangkat sampai dengan pulang kembali. 2) Jaminan Kematian (JKM) berupa santunan kematian kepada ahli waris karena pencari nafkah utama mengalami kecelakaan atau bukan kecelakaan.
8. Premi asuransi ditanggung oleh pemerintah, artinya peserta tidak membayar premi kecuali latihan untuk menabung.
9. Penggantian JKK yang diberikan (maksimal Rp 21.000.000) berupa: 1) biaya pengangkutan ke rumah sakit; 2) penggantian biaya pengobatan; 3) penggantian pembelian alat bantu; 4) santunan sementara tidak bekerja; 5) santunan cacat karena kecelakaan; 6) biaya pemakaman. Penggantian JKM (maksimal Rp 48.000.000) berupa: 1) santunan kematian; 2) biaya pemakaman; 3) santunan berkala.

LAMPIRAN 4: PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

A. Pedoman Wawancara

a. Dinas Sosial Yogyakarta

Nama Informan:

Pekerjaan :

Jabatan :

1. Apa tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Yogyakarta dalam pelaksanaan kebijakan program Askesos?
2. Bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) *new initiative* kepada para pelaksana kebijakan (*policy implementors*)? (kepada *stakeholders* yang terkait dengan pelaksanaan Askesos: BPJS Ketenagakerjaan, LPA, Pendamping dan penerima program Askesos).
3. Bagaimana tahap pelaksanaan program Askesos oleh Dinas Sosial Yogyakarta?
4. Bagaimana sumber daya manusia yang harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Askesos? (sudah cukup, tepat, dan layak atau belum antara jumlah staf yang dibutuhkan dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditangani)
5. Bagaimana sumber daya keuangan atau anggaran untuk program Askesos? (cukup atau tidak)
6. Bagaimana sumber daya peralatan atau fasilitas yang digunakan untuk operasionalisasi pelaksanaan program Askesos? (cukup atau tidak)
7. Bagaimana sumber daya informasi berkaitan dengan cara mengimplementasikan program Askesos dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Askesos?
8. Bagaimana sikap dari para pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan? (dari sisi kemauan, keinginan yang kuat dan kesungguhan)
9. Bagaimana koordinasi struktur birokrasi oleh Dinas Sosial Yogyakarta? (mencakup aspek-aspek struktur organisasi, pembagian kewenangan,

hubungan antara unit-unit organisasi di dalam yang bersangkutan dan hubungan dengan organisasi luar)

10. Bagaimana standar prosedur operasi (*Standard Operating Procedure ‘SOP’*) dalam pelaksanaan program Askesos yang dapat mempermudah dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana dalam melaksanakan program Askesos?
11. Apakah yang menjadi penghambat berjalannya program Askesos?
12. Faktor apakah yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program Askesos?

b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Nama Informan:

Pekerjaan :

Jabatan :

1. Apa tugas, pokok dan fungsi BPJS ketenagakerjaan dalam program Askesos?
2. Bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) *new initiative* kepada BPJS Ketenagakerjaan?
3. Bagaimana sumber daya manusia yang harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Askesos di BPJS Ketenagakerjaan? (sudah cukup, tepat, dan layak atau belum antara jumlah staf yang dibutuhkan dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditangani)
4. Bagaimana sumber daya keuangan atau anggaran untuk program Askesos? (cukup atau tidak)
5. Bagaimana sumber daya peralatan atau fasilitas yang digunakan untuk operasionalisasi pelaksanaan program Askesos? (cukup atau tidak)
6. Bagaimana sumber daya informasi berkaitan dengan cara mengimplementasikan program Askesos dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Askesos?
7. Bagaimana sikap dari para pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan? (dari sisi kemauan, keinginan yang kuat dan kesungguhan)

8. Bagaimana koordinasi struktur birokrasi oleh Dinas Sosial Yogyakarta? (mencakup aspek-aspek struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi di dalam yang bersangkutan dan hubungan dengan organisasi luar)
9. Bagaimana standar prosedur operasi (*Standard Operating Procedure ‘SOP’*) dalam pelaksanaan program Askesos yang dapat mempermudah dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana dalam melaksanakan program Askesos?
10. Apakah yang menjadi penghambat berjalannya program Askesos?
11. Faktor pakah yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program Askesos?

c. Lembaga pelaksana Askesos (LPA)

Nama Informan :

Pekerjaan :

Jabatan :

1. Kapan berdirinya organisasi sosial yang saudara kelola? Sejak kapan organisasi sosial ini direkomendasikan menjadi pelaksana program Askesos?
2. Apa tugas pokok dan fungsi LPA?
3. Apakah menurut LPA program askesos sangat cocok dilaksanakan diwilayah ini? Apa alasannya?
4. Berapa banyak warga binaan yang dibina dalam organisasi sosial ini, dan berapa yang menjadi peserta Askesos?
5. Berapa banyak pekerja sektor informal yang direkrut menjadi peserta Askesos dan berapa banyak yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial?
6. Apakah semua peserta Askesos merupakan warga binaan dari organisasi sosial ini?
7. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang program Askesos?
8. Apakah telah dilakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan program Askesos kepada masyarakat pekerja sektor informal diwilayah saudara? Berapa kali?
9. Berapa orang yang bertanggung jawab menjadi pelaksana program Askesos?

10. Apakah tim yang bertanggung jawab terhadap berjalannya pelaksanaan program Askesos pernah mengikuti kursus, pendidikan atau pelatihan sesuai dengan bidangnya masing-masing?
11. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan sebagai operasionalisasi pelaksanaan program Askesos?
12. Berapa peserta askesos yang pernah mengalami klaim? Kapan dan karena musibah apa?
13. Bagaimana proses klaim tersebut?
14. Berapa kali dana klaim dapat diambil? Berapa besar? Untuk jangka waktu sampai kapan?
15. Sebagai pelaksana program Askesos, bagaimana menurut saudara manfaat program Askesos selama pelaksanaan program Askesos bagi peserta sektor informal?
16. Setelah masa tertanggung satu tahun telah habis apakah masih ada lagi peserta yang berminat untuk menjadi peserta Askesos? Apakah LPA masih bisa merekomendasikan sebagai pelaksana lagi?
17. Bagaimana solusi setelah masa pertanggungan satu tahun berakhir?
18. Adakah aturan yang ditetapkan kepada peserta Askesos? Bagaimana aturan yang ditetapkan LPA terhadap peserta Askesos?
19. Menurut saudara sudah berhasilkah pelaksanaan program Askesos di LPA ini? Jika ia faktor apa yang mendukung? Jika tidak faktor apa yang menjadi penghambat atau kendala?
20. Apakah dengan adanya kebijakan program Askesos menguntungkan bagi LPA?

d. Pendamping

Nama Informan :

Pekerjaan :

Jabatan :

1. Apakah tugas, pokok dan fungsi dari tim pendamping dalam pelaksanaan program Askesos?

2. Kapan tim pendamping melakukan pendampingan?
3. Apa nama LPA tempat saudara melakukan pendampingan terhadap para peserta Askesos?
4. Berapa jumlah pendamping dalam LPA tempat saudara melakukan pendampingan?
5. Bagaimana Dinas Sosial menyampaikan informasi tentang kebijakan program Askesos kepada saudara?
6. Ketentuan keahlian dan kemampuan seperti apa yang dibutuhkan oleh Dinas Sosial yang diberi tanggung jawab sebagai pendamping? Apa keahlian dan kemampuan saudara sebagai pendamping?
7. Bagaimana sumber daya keuangan yang tersedia sebagai operasionalisasi pelaksanaan pendampingan program Askesos?
8. Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan pendampingan program askesos?
9. Bagaimana informasi berjalannya pelaksaan program Askesos menurut saudara?
10. Bagaimana sikap saudara sebagai penanggung jawab pendampingan peserta dalam program askesos? (kemauan, keinginan dan kesungguhan)
11. Bagaimana hubungan sosialisasi saudara selaku penanggung jawab pendamping program Askesos dengan Dinas Sosial, LPA, BPJS, sesama pendamping dalam satu LPA dan pendamping LPA lain, serta para peserta Askesos?

e. Peserta Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)

Nama Informan :

Pekerjaan :

Jabatan :

1. Apakah anda peserta Askesos dan warga binaan LPA? Apa nama organisasi sosial tersebut?
2. Sejak kapan saudara menjadi peserta Askesos?
3. Apakah yang membuat saudara berminat menjadi peserta Askesos?

4. Berapa penghasilan minimal untuk dapat menjadi peserta Askesos?
5. Bagaimana menurut saudara persyaratan yang ditentukan untuk menjadi peserta Askesos?
6. Apakah saudara pernah mengikuti sosialisasi mengenai program Askesos? Dari mana dan siapa yang melaksanakan sosialisasi?
7. Apakah di dalam pelaksanaan program Askesos terdapat program menabung? Apakah saudara menabung? Apa manfaat yang saudara rasakan dari menabung?
8. Apakah anda pernah mendapat santunan dana klaim dari BPJS Ketenagakerjaan? Jika ia kapan? Berapa banyak? Karena musibah apa?
9. Bagaimana saudara mengurus dana klaim? Sulit atau tidak?
10. Bagaimana menurut saudara mengenai besaran santunan yang diterima oleh peserta Askesos? Layakkah jika dibandingkan dengan jenis musibah yang diterima?
11. Bagaimana menurut pendapat saudara dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah tentang program Askesos?
12. Apakah faktor atau kendala pemhambat yang saudara temui selama menjadi peserta Askesos?
13. Apakah manfaat yang saudara rasakan selama menjadi peserta Askesos?

B. Pedoman Observasi

1. Letak geografis dan kondisi fisik Dinas Sosial Provinsi DIY, BPJS Ketenagakerjaan dan LPA.
2. Fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi DIY, BPJS Ketenagakerjaan dan LPA.
3. Struktur organisasi Dinas Sosial DIY, BPJS Ketenagakerjaan dan LPA.
4. Pengendalian pelaksanaan program askesos oleh Dinas Sosial Provinsi DIY.
5. Pemdampingan Program Askesos oleh pendamping.
6. Pemberian pengajuan klaim oleh BPJS Ketenagakerjaan.
7. Pengajuan klaim oleh peserta Askesos.

C. Pedoman Dokumentasi

1. Struktur organisasi pejabat dinas sosial Provinsi DIY.
2. Struktur kepengurusan Bagian Jaminan Sosial.
3. Photo-photo kegiatan pelaksanaan program Askesos di Dinas Sosial Provinsi DIY dan LPA.
4. Sejarah berdirinya Dinas Sosial Provinsi DIY dan bagian jaminan sosial.
5. Tugas, pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi DIY, BPJS Ketenagakerjaan, LPA, Pendamping.
6. Program-program pelaksanaan program Askesos.
7. Jumlah data Lembaga Pelaksana Askesos.
8. Jumlah data Peserta Askesos.

LAMPIRAN 5 TABEL

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM LKH ASKESOS TAHUN 2014
KANTOR CABANG: D.I YOGYAKARTA
PERIODE Juli 2013 s/d Juni 2014

No	KAB/KOTA	NAMA LPA/ WADAH	KEPERSERTAA N PESERTA (TK)	JUMLAH IURAN ASKESOS	KLAIM/JAMINAN				NAMA PESERTA jkk/JKM		
					JAMINAN KECELAKAAN KERJA		JAMINAN KEMATIAN		NAMA PESERTA ASKESOS	AHLI WARIS	
					Rp.	KASU S	Rp.	KASU S	Rp.		
1	KOTA YOGYAKARTA	Paguyuban Parkir Malioboro	492	76.752.000,00	1	-	-	1	21.000.000,00	Sri Lestari	Yosep Novi H.
2	KAB. GUNUNG KIDUL	Orsos Arrif	500	78.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	KAB. GUNUNG KIDUL	Orsos Tunas Kelapa	527	82.212.000,00	2	6.293.270,00	-	-	-	--	-
4	KAB. BANTUL	Orsos Sekaringtyas	583	90.948.000,00	1	50.000.000,00	1	-	-	Sarohmah	Agung Setiawan
5	KAB. BANTUL	LPPM Bina Insan Mandiri	509	79.404.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	KAB. BANTUL	Yayasan Bakti Putra Mandiri	508	79.248.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7	KAB. SLEMAN	LKM Kube Sejahtera 130	542	84.552.000,00	-	-	-	-	-	-	-
8	KAB. SLEMAN	LKS Wiyata Dharma	509	79.404.000,00	-	-	1	21.000.000,00	Margono	Sri Hartanti	
9	KAB. KULON PROGO	Orsos Marem	575	89.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-
10	KAB. KULON PROGO	Orsos Nurul Jadid	488	76.128.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			5233	816.348.000,00	4	56.293.270,00	3	42.000.000,00	-	-	-

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Hani Amaria
Tempat, Tanggal dan Lahir : 11 Januari 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Lampung Utara
Nama Ayah : Suhadi
Nama Ibu : Waryati
E-mail : Haniamaria9@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SDN 1 Gunung Besar : 1997-2003
MTs Al-Islamiyah : 2003-2006
MA Al-Islamiyah : 2006-2009
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2010

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Desember 2014

Hani Amaria
10250042